

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1.	Masih adanya ASN di OPD yang belum sepenuhnya memahami aturan tentang kode etik dan disiplin pegawai	<div>a. Sosialisasi Pergub Sumatera Barat No. 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar</div> <div>b. Menyusun Kode Etik Tingkat OPD yang merupakan turunan dari Pergub Sumbar No. 55 Tahun 2012</div> <div>c. Sosialisasi Kode Etik tingkat OPD</div> <div>d. Adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pemberian Sangsi serta Penghargaan terhadap PNS di OPD beserta mekanisme pelaksanaannya</div>		
II	Komitmen terhadap Kompetensi			
1.	Sudah memadainya pemetaan kompetensi pegawai	a. Adanya dasar hukum yang jelas berkaitan		

		<p>terjaminnya karir PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Analisis Jabatan yang baik)</p> <p>b. Identifikasi kompetensi yang baik dan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki PNS</p> <p>c. Evaluasi kompetensi aparatur</p> <p>d. Melaksanakan diklat, bimtek atau sertifikasi bagi PNS</p>		
III	Kepemimpinan yang Kondusif			
1.	Sudah memadainya kepemimpinan atasan	Kepemimpinan yang baik dan kondusif di dalam OPD		
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan			
1.	Sudah memadainya pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan	<p>a. Adanya dasar hukum yang jelas berkaitan dengan SOTK OPD</p> <p>b. Evaluasi SOTK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan SOTK</p>		
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat			
1.	Sudah memadainya prosedur pendelagasian	a. Adanya dasar hukum		

	wewenang dan tanggungjawab yang tepat	yang jelas dalam pelaksanaan pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab b. Evaluasi terhadap ketepatan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab		
VI	Kebijakan Pengembangan SDM			
1.	Sudah memadainya proses pengembangan SDM pegawai di OPD	a. Evaluasi terkait kebijakan pengembangan SDM sesuai peraturan perundang-undangan b. Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM c. Melaksanakan diklat, bimtek atau sertifikasi bagi PNS		
VII	Pengawasan Internal yang Efektif			
1.	Sudah memadainya pengawasan internal yang dilakukan pimpinan	Pengawasan dan pembinaan langsung terhadap seluruh PNS		
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah			
1.	Sudah memadainya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya	Koordinasi yang baik dengan OPD terkait		

DAFTAR RESIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Resiko	Pemilik Resiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat				
1.	Tidak Terlaksananya Pengumpulan Data Inventarisasi Rupabumi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	1. Tidak Teranggarkannya kegiatan Inventarisasi Rupabumi di Pemerintah Kabupaten/Kota 2. kurangnya SDM pada sub bagian administrasi kewilayahan mengenai teknis perpetaan di Pemerintah Kabupaten/Kota	Kurangnya Data Inventarisasi Rupabumi Wilayah Sumatera Barat
2.	Tidak adanya kesepakatan antara 2 kabupaten yang berbatasan yang berdampak kepada tidak tercapainya target penegasan batas tahun 2017	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	1. Perbedaan usulan pendapat terkait titik koordinat dan garis batas kedua provinsi dan kabupaten yang berbatasan 2. Kurangnya SDM pada sub bagian administrasi kewilayahan mengenai teknis perpetaan di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertundanya usulan penegasan batas Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2017 kepada Kemendagri
Tujuan 2: Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
1.	tidak kondusifnya pelaksanaan Raker Pemprov dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumbar	Sub Bagian Pemerintahan Nagari dan Desa	jumlah peserta yang terlalu banyak tidak didukung oleh tempat dan sound sistym yang representatif	materi dan informasi raker kepada Wali Nagari/Kepala Desa tidak tersampaikan dengan baik
2.	tidak terpenuhinya target kehadiran peserta Rakor Pemprov dengan Aparat Pembina Pemerintah Nagari/Desa Kabupaten/Kota se Sumbar	Sub Bagian Pemerintahan Nagari dan Desa	tidak sampainya informasi kegiatan kepada aparat pembina pemerintahan nagari/desa kabupaten/kota	tidak tersampainya materi dan informasi kepada aparat pembina pemerintahan nagari/desa kabupaten/kota
3.	tidak tercapainya koordinasi yang baik	Sub Bagian Koordinasi	kurangnya pagu dana untuk Biro	Tidak tercapainya

	dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kab/kota	Pemerintahan	Pemerintahan, Tidak cukupnya dukungan dana Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar	pelaksanaan Rakor yang maksimal
4.	Tidak tercapainya peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan	Kurangnya Koordinasi OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota, Sulitnya menentukan jadwal koordinasi kegiatan Forkopimda	Tidak tercapainya Pelaksanaan Kegiatan yang maksimal
Tujuan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional				
1.	Tidak lengkapnya dokumen pendukung IKK LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2016	Sub Bagian Evaluasi Kinerja	1. Kurangnya SDM pada Sub Bagian Evaluasi Kinerja 2. Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota yang tidak mampu menyediakan dokumen pendukung LPPD 2016	Rendahnya Skor hasil EKPPD Kabupaten/Kota Tahun 2016
2.	Tidak lengkapnya data yang diberikan oleh OPD dalam penyusunan LKPJ	Sub Bagian Pelaporan	Tidak adanya bimtek yang diberikan dalam penyusunan LKPj	Terhambatnya penyusunan LKPj Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.	Tidak lengkapnya dokumen pendukung IKK LPPD yang disajikan oleh OPD Provinsi	Sub Bagian Pelaporan	1. Kurangnya SDM pada OPD Provinsi 2. OPD Provinsi tidak mampu menyediakan dokumen pendukung LPPD 3. Kurangnya Koordinasi OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota	Terhambatnya penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat
4.	tidak lancarnya penyelenggaraan pemilihan umum KDH dan Wakil KDH	Sub Bagian Fasilitasi dan Hubungan Antar Lembaga	kurangnya SDM pada Subbag Fasilitasi dan Hub. Antar Lembaga dari segi kualitas dan kuantitas	Pemilihan Umum berjalan tidak lancar
5.	Tidak samanya pemahaman serta perbedaan cara pikir dan cara tindak aparat kecamatan se sumbar	Sub Bagian Daerah Otonom	Perbedaan persepsi dan cara tindakan	Pembinaan Kecamatan se Sumbar tidak berjalan lancar
6.	Tidak berjalan baiknya pelaksanaan PATEN di Kab/Kota se Sumbar	Sub Bagian Daerah Otonom	1. kurangnya tindak lanjut Pelaksanaan PATEN serta kurangnya SDM di Kab/Kota 2. kurangnya kontrol dan pengawasan	Pelaksanaan PATEN tidak berjalan lancar
7.	Kurangnya tindak lanjut Kab/Kota atas hasil Raker Pemprov dengan Aparat	Sub Bagian Daerah Otonom	1. kurangnya tindak lanjut Pelaksanaan PATEN serta kurangnya SDM di	Tujuan pelaksanaan Raker yang diadakan tidak

	Pembina dan Camat se Sumbar		Kab/Kota 2. kurangnya kontrol dan pengawasan	berjalan lancar
8.	Kompetensi Camat cenderung baik disaat diadakannya penilaian kompetensi oleh Prov. Sumbar	Sub Bagian Daerah Otonom	1. kurangnya SDM Camat se Sumbar 2. waktu dan anggaran pelaksanaan penilain kompetensi yang kurang	Kegiatan Penilain Kompetensi Camat tidak tepat sasaran
9.	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dalam pembinaan daerah otonom di Provinsi dan Kab/Kota	Sub Bagian Daerah Otonom dan Sub Bagian Fasilitasi Urusan Konkuren	Belum adanya regulasi dan pemahaman yang jelas terhadap penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dalam pembinaan daerah otonom	Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dalam pembinaan daerah otonom

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

No	Pernyataan Resiko	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
Tujuan 1: Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat				
1.	Tidak Terlaksananya Pengumpulan Data Inventarisasi Rupabumi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1. sosialisasi Inventarisasi Rupabumi pada Aparatur Pemerintah Daerah 2. Komitmen pimpinan terkait kegiatan Inventarisasi Rupabumi kabupaten/kota	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Triwulan I (Sosialisasi), Komitmen dilaksanakan pada saat rapat fasilitasi penegasan batas di tahun 2017
2.	Tidak adanya kesepakatan antara 2 kabupaten yang berbatasan yang berdampak kepada tidak tercapainya target penegasan batas tahun 2017	sosialisasi penegasan batas pada masyarakat, komitmen pimpinan terkait kegiatan penegasan batas kabupaten/kota	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	ketika pengusulan RKA, Anggaran perubahan,
Tujuan 2: Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
1.	tidak kondusifnya pelaksanaan Raker Pemprov dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumbar	peningkatan kualitas tempat acara dan sound sistym yang representatif	Sub Bagian Pemerintahan Nagari dan Desa	ketika pengusulan RKA, Anggaran perubahan,
2.	tidak terpenuhinya target kehadiran peserta Rakor Pemprov dengan Aparat Pembina Pemerintah Nagari/Desa Kabupaten/Kota se Sumbar	pemberitahuan acara sebelum secara lisan , konfirmasi kehadiran peserta	Sub Bagian Pemerintahan Nagari dan Desa	sebelum undangan dibagikan, sebelum pelaksanaan acara
3.	tidak tercapainya koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kab/kota	Ketersedian Dana yang maksimal	Subbag Koordinasi Pemerintahan	Triwulan I, II, III dan IV (Rakor),
4.	Tidak tercapainya peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Kepastian jadwal kegiatan Forkopimda	Subbag Koordinasi Pemerintahan	Triwulan I, II, III dan IV

Tujuan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional				
1.	Tidak lengkapnya dokumen pendukung IKK LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2016	Peningkatan Sosialisasi EKPPD Kepada Tim Evaluator dan Tim Penyusun LPPD Kab/Kota	Subag Evaluasi Kinerja	Triwulan I (Sosialisasi)
2.	Tidak lengkapnya data yang diberikan oleh OPD dalam penyusunan LKPJ	Bimtek penyusunan LKPJ	Sub Bagian Pelaporan	Triwulan IV (Bimtek),
3.	Tidak lengkapnya dokumen pendukung IKK LPPD yang disajikan oleh OPD Provinsi	Bimtek penyusunan LPPD	Sub Bagian Pelaporan	Triwulan IV (Bimtek),
4.	tidak lancarnya penyelenggaraan pemilihan umum KDH dan Wakil KDH	penambahan jumlah personil pada Subag. F dan HAL, sosialisasi Per-UU ttg Pilkada	Subbag Fasilitasi dan Hubungan Antar Lembaga	1 Tahun
5.	Tidak samanya pemahaman serta perbedaan cara pikir dan cara tindak aparat kecamatan se sumbar	Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang terkait dengan Kecamatan.	Subbag Daerah Otonom	
6.	Tidak berjalan baiknya pelaksanaan PATEN di Kab/Kota se Sumbar	Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang terkait dengan Kecamatan.	Subbag Daerah Otonom	
7.	Kurangnya tindak lanjut Kab/Kota atas hasil Raker Pemprov dengan Aparat Pembina dan Camat se Sumbar	Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang terkait dengan Kecamatan.	Subbag Daerah Otonom	Triwulan I
8.	Kompetensi Camat cenderung baik disaat diadakannya penilaian kompetensi oleh Prov. Sumbar	Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang terkait dengan Kecamatan.	Subbag Daerah Otonom	Triwulan II
9.	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dalam pembinaan daerah otonom di Provinsi dan Kab/Kota	Peraturan Peundang-undangan yang terkait, NSPK dan SPM	Subbag Daerah Otonom dan Subbag. Urusan Pemerintahan	1 tahun

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1: Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat					
1.	SK Tim Rupabumi, SOP, Buku Laporan Kegiatan tentang Pelaksanaan Inventarisasi Rupabumi Kabupaten/Kota, sosialisasi Inventarisasi Rupabumi pada aparatur Pemerintah Daerah, komitmen pimpinan terkait kegiatan Inventarisasi Rupabumi kabupaten/kota	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Pemerintah Kabupaten/Kota	Triwulan I
2.	sosialisasi penegasan batas pada masyarakat, komitmen pimpinan terkait kegiatan penegasan batas kabupaten/kota	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Pemerintah Kabupaten/Kota	Triwulan I
Tujuan 2: Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
1.	peningkatan kualitas tempat acara dan sound sistym yang representatif	Surat	Sub Bagian Pemerintahan Nagari dan Desa	DPKA Prov Sumbar, TAPD	Triwulan IV
2.	pemberitahuan acara sebelum secara lisan , konfirmasi kehadiran peserta	Medsos	Sub Bagian Pemerintahan Nagari dan Desa	Kabupaten/Kota	Triwulan I
3.	Ketersediaan Dana Kegiatan	Instruksi Pimpinan, Surat edaran	Subbag Koordinasi Pemerintahan	Bagian Program OPD Provinsi	Triwulan I, II, II dan VI
4.	Kepastian jadwal kegiatan Forkopimda	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Subbag Koordinasi Pemerintahan	Bagian Program OPD Provinsi	Triwulan I, II, II dan VI
Tujuan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional					
1.	Sosialisasi EKPPD Kepada Tim Evaluator dan Tim Penyusun LPPD Kab/Kota	Kegiatan Sosialisasi, Instruksi Pimpinan, Surat Edaran, dan Media Sosial	Sub Bagian Evaluasi Kinerja	Tim Evaluator dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Triwulan I
2.	Bimtek penyusunan LKPj	Instruksi Pimpinan, Surat	Sub Bagian	Bagian Program	Triwulan VI

		edaran, Medsos	Pelaporan	OPD Provinsi	
3.	Bimtek penyusunan LPPD	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Pelaporan	Bagian Program OPD Provinsi	Triwulan VI
4.	penambahan jumlah personil pada Subag. F dan HAL, sosialisasi Per-UU ttg Pilkada	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Fasilitas dan HAL	Provinsi dan Kab/Kota	1 tahun
5.	Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Kecamatan.	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Daerah Otonom	Kabupaten/Kota	1 tahun
6.	Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Kecamatan.	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Daerah Otonom	Kabupaten/Kota	1 tahun
7.	SK Panitia Pelaksana, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kecamatan.	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Daerah Otonom	Kabupaten/Kota	1 tahun
8.	SK Panitia Pelaksana dan Tim Penilai, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kecamatan	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Daerah Otonom	Kabupaten/Kota	1 tahun
9.	SK Tim, Peraturan Perundang-undangan terkait, NSPK dan SPM. SOP	Instruksi Pimpinan, Surat edaran, Medsos	Sub Bagian Daerah Otonom da Sub Bagian Fasilitas Urusan Konkuren	Kabupaten/Kota	1 tahun

Lampiran 5

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantuan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
----	--------------------------------	---	---	------------------------------

1	2	3	4	5
Tujuan 1: Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat				
1.	SK Tim Rupabumi, SOP, Buku Laporan Kegiatan tentang Pelaksanaan Inventarisasi Rupabumi Kabupaten/Kota, sosialisasi Inventarisasi Rupabumi pada aparatur Pemerintah Daerah, komitmen pimpinan terkait kegiatan Inventarisasi Rupabumi kabupaten/kota	Pemantauan berkelanjutan dalam bentuk Verifikasi Kegiatan Rupabumi	Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	Setiap Triwulan
2.	sosialisasi penegasan batas pada masyarakat, komitmen pimpinan terkait kegiatan penegasan batas kabupaten/kota	Pemantauan berkelanjutan dalam bentuk Verifikasi Kegiatan Penegasan Batas	Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	Setiap Bulan sesuai dengan Jadwal Verifikasi Penegasan Batas Kabupaten/Kota
Tujuan 2: Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
1.	peningkatan kualitas tempat acara yang representatif		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	ketika pengusulan RKA, Anggaran perubahan,
2.	konfirmasi kehadiran peserta		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	sebelum undangan dibagikan, sebelum pelaksanaan acara
3.	Ketersediaan Dana Kegiatan		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
4.	Kepastian jadwal kegiatan Forkopimda		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun

Tujuan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional				
1.	Sosialisasi EKPPD Kepada Tim Evaluator dan Tim Penyusun LPPD Kab/Kota		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Otonomi Daerah, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
2.	Bimtek penyusunan LKPj		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Otonomi Daerah, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
3.	Bimtek penyusunan LPPD		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Otonomi Daerah, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
4.	penambahan jumlah personil pada Subag. F dan HAL, sosialisasi Per-UU ttg Pilkada		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
5.	Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Kecamatan.		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
6.	Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Kecamatan.		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
7.	SK Panitia Pelaksana, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kecamatan.		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun
8.	SK Panitia Pelaksana dan Tim Penilai, Peraturan		Pemantauan berkelanjutan	1 tahun

	Perundang-Undangan yang terkait dengan Kecamatan		oleh Atasan Langsung; Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	
9.	SK Tim, Peraturan Perundang-undangan terkait, NSPK dan SPM. SOP		Pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; Kabag Otonomi Daerah dan Kabag Administrasi Pemerintahan, Ka. Biro Pemerintahan	1 tahun